

Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Wakatobi

Ferlin, Ahmad, La Ode Samsul Barani

Universitas Halu Oleo

ferliwakatobi@gmail.com, ahmad2020301@uho.ac.id, samsulkaledupa@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyse the Tourism Destination Development Policy in Wakatobi Regency. Thesis. Postgraduate Master of Economics Study Program. Halu Oleo University. Supervised by Ahmad and La Ode Samsul Barani. The result showed that the tourist destinations development policy contained in Regional Regulation Number 04 of 2017 concerning the Regional Tourism Master Plan of Wakatobi Regency 2016-2025, trouhgt article 49, article 50, article 51, article 52, and article 55 Paragraph 2 states that there are 20 location of Regency Tourism Destination and 7 Regional Tourism Strategic Areas where all the development of each destination area is developed in accordance with its potential, and supported by a strategy for developing facilities and infrastructure such as increasing the availability of clean water, increasing the capacity of electrical energy availability, developing telecommunications, stations, improving, waste facilities and infrastructure, improving, wastewater management installations, developing distater mitigation facilities and infrastructure, developing higher education institutions, institutional strengthening facilities and SMK Tourism facilitie, developing tourism health facilities, developing and organizing traditional markets as well as touristattractions. However, the implementation of development needs to be improved such as accessibility, especially in air transport, which currently still disconnected.

Keywords: Policy, Development, Tourim Destination; Journal Al-Kharaj; Article Templates

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Wakatobi. Tesis. Program Studi Ilmu Magister Ekonomi Pascasarjana. Universitas Halu Oleo. Dibimbing oleh Ahmad dan La Ode Samsul Barani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan destinasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi, melalui pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, dan pasal 55 ayat 2 menyebutkan ada 20 lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten dan 7 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dimana semua pengembangan masing-masing wilayah destinasi dikembangkan sesuai dengan potensinya, serta didukung dengan strategi pengembangan sarana dan prasarana seperti meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatkan kapasitas ketersediaan energy listrik, Pengembangan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS), meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, meningkatkan instalasi pengelolaan air limbah, mengembangkan sarana dan prasaran mitigasi bencana, mengembangkan lembaga perguruan tinggi, Fasilitasi penguatan kelembagaan dan fasilitas pada SMK Pariwisata, Mengembangkan fasilitas kesehatan pariwisata, Mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata. Namun, pada implementasi pengembangan masih perlu ditingkatkan seperti aksesibilitas terutama pada akses transportasi udara yang saat ini masih terputus.

Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Destinasi wisata; Jurnal Al-Kharaj; Template Artikel

PENDAHULUAN

Pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haryana (2020), pariwisata merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah nasional, dan global.

Melihat pentingnya keberadaan pariwisata ini pemerintah sejak lama telah menaruh perhatian serius tentang pengembangan pariwisata hal ini sebagaimana tertuang dari berbagai bentuk kebijakan dalam RIPPARNAS dan diturunkan keberbagai daerah. RIPPARNAS merupakan turunan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan penyusunan RIPPARDA di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Lebih lanjut pengembangan destinasi pariwisata merupakan program utama dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata, pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan even, dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya (Setiawan,2023).

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, Kemenparekraf telah menetapkan enam belas KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang tersebar di dua belas provinsi sebagai focus pengembangan. Penetapan kawasan fokus tersebut diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya Kemenparekraf. Sebagai upaya mendukung pengembangan KSPN Wakatobi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Kaya sejak 25 Oktober 2022 hingga 26 November 2023 difokuskan pada penataan 4 destinasi wisata, yakni Toliamba, Sombu Dive, Danau Kapota, Dan Alun-alun Mendeka. Selain itu, kementerian PUPR juga telah mempersiapkan penataan KSPN Wakatobi Tahap II yang dipusatkan pada Pembangunan Infastruktur Waterfront Marina dan Keraton Liya. Kegiatan penataan kawasan wisata ini merupakan kombinasi antara pariwisata modern dan pelestarian sejarah (SP.BIRKOM/XII/2023/693).

Sebagai bentuk respon dari dukungan pemerintah pusat dan berbagai keistimewaan pada Kabupaten Wakatobi, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 yang mencakup 4 aspek pembangunan kepariwisataan daerah yaitu; 1) Destinasi pariwisata, 2) Pemasaran pariwisata, 3) Industri pariwisata, dan 4) Kelembagaan Pariwisata. Kemudian Struktur Pelayanan Pariwisata Daerah terdapat 4 bagian yaitu; 1) Pusat pelayanan primer, 2) Pusat pelayanan sekunder, 3) Pusat pelayanan tersier, dan 4) Sistem jaringan Aksesibilitas.

Penelitian terdahulu menyebutkan menyebutkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara optimal. Dimana, beberapa sektor yang dianggap belum optimal seperti pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, dan komitmen implementasi kebijakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, dkk (2019). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kebijakan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Wakatobi”.

Carl F (1969) dalam Agustino (2008) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan mencakup keterkaitan antara kehendak, tindakan, dan hasil. Pada kehendak, kebijakan terefleksikan pada sikap pemerintah. Pada tingkat tindakan, kebijakan terefleksikan pada perilaku pemerintah, dan pada level hasil yaitu yang benar-benar dilakukan pemerintah (Heywood, 1997). Pada defenisi lain kebijakan juga dimaknai sebagai satu manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan, sehingga dapat dijadikan basis penyusunan basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parsons, 2001). Sore dan Sobirin (2017) mensarikan pendapat para pakar bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara konsisten sehingga tujuan tercapai. Ada tiga bidang kinerja utama dalam manajemen destinasi di tingkat DMO: Kepemimpinan Strategis, Penerapan Efektif, dan Tata Kelola yang Efisien.

Menurut Holloway dalam Sukma, (2015) bahwa pariwisata adalah aktivitas dari pemanfaatan waktu luang atau leisure, dan keluar negara untuk mencari sesuatu yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari dan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat lokal. Menurut Hall dan Williams, (2019) menyatakan bahwa pariwisata adalah gabungan dari aktivitas, layanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan: transportasi, akomodasi, tempat makan dan minum, toko, hiburan, fasilitas aktivitas, dan layanan perhotelan lainnya yang tersedia untuk individu atau kelompok yang bepergian jauh dari rumah. Gee (2000) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian. Menurut Richter & Richter dalam (Hall, 2000) hamper secara universal pemerintah di dunia menerima pariwisata yang memiliki dampak positif, sehingga kebijakan pariwisata di buat untuk memperluas industry pariwisata. Menurut Mill and Morrison dalam Hall (2000) ada lima bidang utama keterlibatan sektor publik dalam pariwisata yaitu koordinasi, perencanaan, perundang-undangan dan peraturan, kewirausahaan dan stimulasi.

Tata kelola destinasi merupakan upaya peningkatan kapasitas destinasi pariwisata dalam jalinan aktifitas, keberhasilannya dibangun dengan peran serta masyarakat, perencanaan dan implementasi, daya dukung sosial, ketersediaan infrastruktur, daya dukung fisik, dan kualitas pelayanan (Teguh, 2015). Sulistyadi et al. (2017) tata kelola Destinasi Pariwisata di Indonesia merupakan penerapan dari konsep DMO (Destination Management Organization) dan DG (Destination

Governance), konsep ini tidak dapat terpisahkan bahwa DMO yang secara teknis dan lebih spesifik, sementara DG menekankan pada kebijakan-kebijakan, administrasi, yang sifatnya makro. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas dikemas dalam promosi yang bertanggungjawab dengan komponen-komponen, antara lain: pengembangan sarana dan prasarana, investasi, pengembangan sumber daya manusia khususnya sumber daya masyarakat lokal tetapi juga mencakup penataan, kualitas layanan, pengelolaan lingkungan ekosistem, dan pengembangan nilai lokal secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan yang berdampak pada peningkatan ekonomi (Dewanti, 2019).

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lainnya yang dilalui selama perjalanannya (misalnya daerah transit). Suatu tempat akan memiliki batas-batas tertentu baik secara aktual maupun hukum. Destinasi pariwisata didefinisikan sebagai: "A significant place visited on a trip, with some form of actual or perceived boundary. The basic geographic unit for the production of tourism statistics" (Ricardson dan Fluker, 2004).

METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif. digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam dan detail tanpa menggunakan angka atau statistik. penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku, pengalaman, atau pandangan sybjek penelitian yang diperoleh dari observasi wawancara, dan analisis dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data *online*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wakatobi dari bulan Juni - juli 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Wakatobi

Penetapan wilayah destinasi membutuhkan langkah-langkah pengembangan yang tepat agar tujuan pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten dapat tercapai dengan baik. Menurut laporan akhir RIPPARDA 2016 Strategi perwilayahan pariwisata Kabupaten Wakatobi meliputi:

1. Menetapkan pusat pelayanan primer, sekunder dan tersier secara terpadu dengan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan.
2. Memperkuat orientasi, identitas dan fasilitas pada pusat-pusat pelayanan pariwisata.

3. Menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dengan mempertimbangkan rentang geografis, merata di pulau-pulau utama dan menggali keunggulannya.
4. Menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah dan menggali tema masing-masing kawasan sesuai potensi yang menjadi keunggulannya.
5. Menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang telah mempunyai citra yang kuat dan dikenal luas serta dinilai berpotensi sebagai penggerak kepariwisataan di masing-masing DPK.
6. Memperkuat keterkaitan antar-KPP, antara KPP dan antar KSP kabupaten melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata, serta pengembangan produk serta paket-paket wisata

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal dan Eksternal

Upaya peningkatan kualitas pariwisata membutuhkan kerangka yang tepat dalam pengembangannya agar bias berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam mengembangkan suatu wilayah destinasi ke destinasi yang lain membutuhkan kemudahan akses transportasi baik darat, laut, maupun udara. Maka, strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Laporan Akhir RIPPARDA yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata.
2. Mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata.
3. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelabuhan di masing-masing pulau.
4. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing pulau.
5. Mengembangkan kapasitas Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut
6. Akselerasi pembangunan marina di Wangi-Wangi dan pengembangan dermaga-dermaga khusus pariwisata di masing-masing kawasan pariwisata secara representatif.
7. Optimalisasi dan pengembangan Pelabuhan Laut sebagai pelabuhan kapal cruise dalam rangka meningkatkan intensitas kunjungan kapal cruise.
8. Mengembangkan kapasitas Bandara Matahora sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui udara termasuk kemungkinan pengembangan sebagai Bandara Internasional.
9. Meningkatkan jumlah rute dan frekuensi penerbangan di Bandara Matahora termasuk penerbangan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali.

10. Mendorong pengembangan Bandara Halouleo dengan fasilitas internasional dan pelayanan VOA.
11. Meningkatkan kelas/status dan/atau mengintegrasikan fungsi Bandara Maranggi di Pulau Tomia sebagai Bandara umum disertai dengan pengembangan kapasitas bandara.
12. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan.
13. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan.
14. Meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan.
15. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat
16. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat.
17. Memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat.

Strategi Pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Strategi pengembangan prasarana dan fasilitas umum yang dapat mendukung pariwisata daerah dapat dilihat pada poin berikut:

1. Meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringan distribusinya
2. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik.
3. Pengembangan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) di seluruh wilayah secara merata.
4. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat
5. Mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata.
6. Mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.
7. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan/atau swasta.
8. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan fasilitas pada SMK Pariwisata
9. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata.

10. Mengembangkan fasilitas kesehatan pariwisata, termasuk optimalisasi pendayagunaan fasilitas kesehatan wisata selam.
11. Mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.

Kebijakan Destinasi Wisata kabupaten Wakatobi

Kebijakan pengembangan destinasi wisata secara terperinci telah dimuat pada PERDA RIPPARDA Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi 2016-2025 yang dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 1. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

No.	Destinasi Pariwisata Kabupaten	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah	Kawasan Strategi Pariwisata Daerah
1.	DPK Pulau Wangi-Wangi Dan Sekitarnya	1. KPPD Sombu-Waha dan sekitarnya 2. KPPD Patuno dan sekitarnya 3. KPPD Kota Wangi-Wangi dan sekitarnya 4. KPPD Liya Togo dan sekitarnya 5. KPPD Kapota-Kolo dan sekitarnya 6. KPPD Tindoi dan sekitarnya	
2.	DPK Pulau Kaledupa dan sekitarnya	1. KPPD Pulau Hoga dan sekitarnya 2. KPPD Sombanodan sekitarnya 3. KPPD Ambeua dan sekitarnya 4. KPPD Langge dan sekitarnya 5. KPPD Pajam dan sekitarnya	1. KSPD Matahora dan sekitarnya 2. KSPD Kapota dan sekitarnya 3. KSPD Hoga dan sekitarnya 4. KSPD Sombano dan sekitarnya
3.	DPK Pulau Tomia dan sekitarnya	1. KPPD Pulau Tolandono dan sekitarnya 2. KPPD Pulau Runduma dan Sekitarnya 3. KPPD Kulati dan sekitarnya 4. KPPD Waha dan sekitarnya 5. KPPD Puncak Kahianga dan sekitarnya	5. KSPD Tolandono dan sekitarnya 6. KSPD Huntete dan sekitarnya 7. KSPD Palahidu dan sekitarnya

4.	DKP Pulau Binongko dan sekitarnya	1. KPPD Rukuwa dan sekitarnya 2. KPPD Wali dan sekitarnya 3. KPPD Popalia dan sekitarnya 4. KPPD Haka dan sekitarnya
----	-----------------------------------	---

Sumber: PERDA RIPPARDA Kabupaten Wakatobi 2016-2025 (Data Diolah).

Data diatas telah menunjukkan pembagian daerah-daerah pariwisata yang akan menjadi langkah strategis Kabupaten untuk dikembangkan pada periode waktu 2016-2025. Penentuan kebijakan pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan berbagai bentuk analisis dan pertimbangan strategis terhadap potensi kawasan yang menjadi lokasi pengembangan.

Pembagian struktur perwilayahan pariwisata daerah terdapat dalam pasal 47 yang meliputi: a). Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK); b). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD); c). Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD); dan d). Daya Tarik Wisata (DTW). Kemudian pembagian perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten terdapat dalam pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 52 yang dapat dilihat berikut:

1. Pasal 49 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Wangi-Wangi dan Sekitarnya meliputi: a). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Sombu-Waha dan sekitarnya; b). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Patuno dan Sekitarnya; c). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kota WangiWangi dan sekitarnya; d). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Liya Togo dan sekitarnya; e). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kapota-Kolo dan sekitarnya; dan f). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Tindoi dan sekitarnya.
2. Pasal 50 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Piulau Kaledupa dan sekitarnya meliputi: a). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pulau Hoga dan sekitarnya; b). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Sombano dan sekitarnya; c). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pajam dan sekitarnya; d). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Langge dan sekitarnya; e). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Ambeua dan sekitarnya.
3. Pasal 51 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Tomina dan sekitarnya meliputi: a). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pulau Tolandono dan sekitarnya; b). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Waha dan sekitarnya;c). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kulati dan sekitarnya;d). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Puncak Kahianga dan sekitarnya; dan e). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pulau Runduma dan sekitarnya.
4. Pasal 52 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Binongko dan sekitarnya meliputi: a). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Runduma dan sekitarnya; b). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Wali

dan sekitarnya; c). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Popalia dan sekitarnya; dan d). Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Haka dan sekitarnya.

Kebijakan pengembangan wilayah destinasi terdapat beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang terdapat dalam pasal 55 ayat 2 menyebutkan bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah terdiri atas : a). KSPD Matahora dan sekitarnya; b). KSPD Kapota dan sekitarnya; c). KSPD Hoga dan sekitarnya; d). KSPD Sombano dan sekitarnya; e). KSPD Tolandono dan sekitarnya; f). KSPD Huntete dan sekitarnya; dan g). KSPD Palahidu dan sekitarnya.

Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Wakatobi

Pengembangan destinasi wisata sebagai bentuk dari implementasi strategi kebijakan adalah langkah konkrit untuk memajukan industry pariwisata daerah. Pengembangan dapat dilihat seperti berikut:

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)

Pengembangannya memperhatikan RTRW Kabupaten Wakatobi, kondisi geografis wilayah kabupaten, potensi daya tarik wisata sebagai penguat daya saing, pemerataan pembangunan pariwisata selaras dengan potensinya serta keterpaduan pengembangan pariwisata dengan sektor-sektor terkait maka perwilayahan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi berdasarkan PERDA RIPPARDA dibagi ke dalam 4 (empat) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang tersebar di seluruh wilayah, yaitu:

DPK Wangi-Wangi dan sekitarnya

Berdasarkan pasal 48 fokus utama dan pengembangan: Penguat aksesibilitas dan konektivitas eksternal dan pintu gerbang utama kepariwisataan Kabupaten, Penguat orientasi dan citra pariwisata kabupaten, Pengembangan wisata skala massal tetapi sangat terkontrol, Pengembangan wisata perkotaan, wisata bahari, terestrial, budaya dan MICE skala nasional dan nasional, Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan Pusat Pelayanan Primer, Pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata bahari, Pusat pengembangan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan yang kuat dengan sektor-sektor pelayanan publik skala kabupaten (pendidikan, kesehatan) dan sektor-sektor ekonomi (perdagangan dan jasa-jasa lainnya, perikanan, ekonomi kreatif dan perhubungan), Pusat penatakelolaan pembangunan kepariwisataan kabupaten, Pusat pengembangan SDM masyarakat dan SDM pariwisata berbasis pendidikan tinggi.

DPK Kaledupa dan Sekitarnya

Berdasarkan pasal 48 fokus utama dan pengembangan: Pusat pertumbuhan pariwisata kabupaten di Pulau Kaledupa dan sekitarnya, Pendukung penguatan citra

pariwisata kabupaten, Pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari, ilmiah, agrowisata, pedesaan, dan desa wisata berbasis kampung adat beserta arsitektur tradisional dan tradisi, Pusat pengembangan destinasi ekowisata mainstream, Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan Pusat Pelayanan Sekunder, Pusat pengembangan SDM masyarakat dan SDM pariwisata berbasis pada level pendidikan menengah, Pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor UKM, kerajinan rumah tangga, perikanan dan pertanian lahan kering.

DPK Tomia dan Sekitarnya

Berdasarkan pasal 48 fokus utama dan pengembangan: Pusat pertumbuhan pariwisata kabupaten di Pulau Tomia dan sekitarnya, Pendukung penguatan citra pariwisata kabupaten, Pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari, panorama puncak, olah raga, wisata budaya berbasis warisan budaya, dan desa-desa wisata percontohan kabupaten, Pusat pengembangan destinasi pariwisata yang terpadu dengan pusat pengembangan kebudayaan Wakatobi, Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan Pusat Pelayanan Sekunder, Pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor UKM, kerajinan rumah tangga dan perikanan

DPK Binongko dan sekitarnya

Berdasarkan pasal 48 fokus utama dan pengembangan: Pusat pertumbuhan pariwisata kabupaten di Pulau Binongko dan sekitarnya, Pendukung penguatan citra pariwisata kabupaten, Pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari dan petualangan bahari, petualangan darat, wisata sejarah, pedesaan dan desa wisata berbasis keunikan adat istiadat dan tradisi, Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan Pusat Pelayanan Sekunder, dan Pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor UKM dan kerajinan rumah tangga.

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPPD)

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Di seluruh Destinasi Pariwisata Kabupaten direncanakan sebanyak 20 Kawasan Pengembangan Pariwisata. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten tersebar di seluruh DPK secara proporsional sesuai karakter dan potensi unggulan daya tarik wisata serta jaringan aksesibilitasnya. Rencana pengembangan dan penyediaan fasilitas wisata meliputi: 1) Fasilitas daya tarik wisata; parkir, plaza atau meeting point, pos penerimaan pengunjung, toilet, pembilasan dan ruang ganti pakaian, fasilitas informasi pariwisata, fasilitas interpretasi, peta dan rambu-rambu pariwisata, pos balawista, furniture pantai, lampu penerangan, dan lain-lain). 2) Akomodasi pariwisata : homestay/penginapan, pondok wisata sampai berkelas

bintang. 3) Rumah makan/restoran; berbagai kelas dan menu masakan, serta warung kuliner komunal. 4) Penyewaan fasilitas atraksi wisata bahari : kano, baju pelampung, snorkling and diving equipment, dll. 5) Fasilitas pariwisata lainnya : warung/toko cinderamata, toko kebutuhan sehari-hari, ATM, dll. Rencana penyediaan fasilitas pasarana dan fasilitas umum pendukung; jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi; Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke pantai dan pedestrian, Sarana angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan Wangi-Wangi, Bandara Matahora dan daya tarik wisata di sekitarnya.

Pengembangan Kawasan Strategis Daerah (KSPD)

Kawasan strategis pariwisata untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kriteria penetapan KSP Kabupaten yaitu: memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata, memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas, komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan, kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah, posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis, memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional, nasional dan internasional serta potensi tren produk wisata masa depan, posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional, memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat, memiliki kekhususan dari wilayah, berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional.

Implementasi kebijakan Pengembangan

Implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata dalam mendukung peningkatan kualitas pariwisata dapat dilihat dari keterangan informan berikut:

Informan pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi mengatakan “pembangunan destinasi di seluruh Wakatobi hampir semuanya terbangun dari yang direncanakan pembangunannya. Dan insha allah dalam waktu dekat ini kita sedang mendiskusikan tentang KSPN tahap II. Jadi Wakatobi ini dengan berada diposisi salah satu dari 10 top destinasi sangat diuntungkan dalam kebijakan pembangunan nasional pariwisata, jadi dengan 4 KSPN tahap I yang sudah dilakukan ini sangat luar biasa, dan kemarin kita dalam rangka persiapan monitoring dari TIM monitoring Bank Dunia, tanggal 9 september dan pembahasan utamanya itu adalah mengenai kebijakan pemanfaatan ini. Namun, kita tau bersama permasalahan kita

hari ini adalah akses transportasi udara kita masih terputus, keadaan ini terjadi dari tahun 2023, itu kita rasa permasalahan yang besar karna berpengaruh pada waktu akses wisatawan kita. Banyak paket-paket wisata yang desan ke Wakatobi namun pada akhirnya di batalkan karena akses transportasi udara yang masih bermasalah”.

Informan kedua Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi yang mengatakan “kebijakan merujuk kepada RIPPARDA, inilah dasar perencanaan kita dimana dalam RIPPARDA itu ada pengembangan aspek kewilayahan ada 4 DPK, ada 7 KSPD, dan 20 KPPD. Dengan masing-masing karakteristiknya bisa masuk semua. Makanya sebagai daerah Top Destinasi maka pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BAPPENAS membuat Integrated Tourism Master Plan. Tapi perlu kita tau hari ini masalah penerbangan pesawat kita yang masih belum jalan”.

Informan ketiga Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi yang mengatakan “salah satu brand dari Wakatobi ini adalah KSPN dalam rangka membangun infrastruktur pariwisata KSPN bagian dari perjuangan untuk merebut brand yang bisa di gunakan Wakatobi untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur dibidang kepariwisataan, pembangunan KSPN merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan pariwisata strategis dalam RIPPARDA”.

Informan ke empat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi mengatakan “Dari sisi pariwisatanya yang salah satu kebijakan yang sama sama kami sinkronkan melalui perencanaan di BAPPEDA adalah penetapan prioritas program unggulan kami di Dinas PERINDAG. Disetiap perencanaan melalui dana alokasi khusus biasanya kami dari PERINDAG itu santlok kegiatan kami itu pada kegiatan pariwisata sehingga perencanaan kami sama-sama. Program unggulan kami selaras dengan program unggulan di pariwisata, misalnya di pulau Wangi-wangi ini kami berbasis kuliner, kaledupa itu Tenun(Homoru), Tomia itu adalah Kriya dan di Binongko itu adalah Logam dan ini selaras dengan apa yang ada di pariwisata”.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Wakatobi di temukan bahwa pengembangan destinasi wisata yang ditetapkan dalam bentuk PERDA RIPPARDA sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pembagian lokasi-lokasi pariwisata daerah yang ditetapkan menjadi 4 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), 20 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), 7 Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD). Kemudian, pengembangan masing-masing wilayah destinasi berdasarkan PERDA RIPPARDA Kabupaten juga dirinci dengan baik, detail pengembangannya seperti dukungan pembangunan aksesibilitas, pembangunan fasilitas pendukung wisata yang mencakup air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan restoran, lokasi ekonomi kreatif dan lain sebagainya.

Secara konsep pengembangan sudah baik hal dapat dilihat dari konsep pengembangan masing-masing daerah destinasi yang dirinci yang sudah ditetapkan. Menurut Robert Christie Mill dan Alastair M. Morrison (2009) mengatakan salah satu

elemen destinasi wisata adalah infrastruktur dan Transportasi. Infrastruktur terdiri dari semua pembangunan bawah tanah dan pembangunan permukaan suatu wilayah yang terdiri dari; Sistem pengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, sumber daya, area pembangunan/drainase. Sedangkan Transportasi disuatu destinasi (daerah tujuan) terbukti memberikan kontribusi positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Pada teori diatas harusnya sudah cukup menjadi alasan untuk mengatakan bahwa konsep pengembangan destinasi wisata Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik namun permasalahan sekarang ini ini ada pada implementasi kebijakan. Sehingga pada implementasi pengembangan masih perlu ditingkatkan seperti aksesibilitas terutama pada akses transportasi udara yang saat ini masih terputus sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa “masalah utama kita pada saat ini transportasi udara yang masih macet”.

Tabel 2. Wisatawan Mancanegara dan Domestik Di Kabupaten Wakatobi

Asal Wisatawan	Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Wakatobi (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Domestik	9.033	10.528	7.196
M mancanegara	21	810	1.921
Jumlah	9.054	11.338	9.117

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi 2023 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pergerakan mobilitas wisatawan yang ke Wakatobi cenderung menurun dari data tahun 2022 hal itu disebabkan oleh terputusnya akses transportasi udara yang terjadi dari tahun 2023. Hasil penelitian ini pada intinya sama dengan yang dilakukan oleh (Mulyana dkk. 2019) dimana hasil penelitiannya menyatakan kebijakan yang diterapkan belum mampu meningkatkan kinerja pariwisata secara optimal. Beberapa indikator yang belum optimal antara lain pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, dan komitmen implementasi kebijakan. Penemuan dari penelitian ini mengatakan secara konsep kebijakan itu baik namun komitmen implementasi kebijakan perlu di tingkatkan agar mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang baik dan efisien seperti yang tertuang dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Wakatobi 2016-2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pengembangan destinasi wisata dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan pengembangan destinasi wisata melalui PERDA RIPPARDA sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari detail penetapan kebijakan mulai dari perencanaan, sampai dengan detail pengembangan destinasi wisata pada masing-masing wilayah strategis pengembangan wisata daerah. Namun, terlepas dari konsep pengembangan destinasi wisata yang baik ada beberapa hal yang menjadi

permasalahan yaitu komitmen implementasi kebijakan seperti yang disebutkan pada PERDA RIPPARDA tentang aksesibilitas namun permasalahan pengembangan wisata adalah transportasi udara.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan destinasi wisata agar pengembangan destinasi wisata dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pengembangan destinasi wisata di katkan dengan sektor kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewanti, I. S., & Soeprapto, A. (2019). Pengembangan Pariwisata Perkotaan Berbasis Komunitas: Studi Pada Kmpung Wisata Dipowinatan Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17 (1), 58-66.

Mulyana, Y.,& Huraerah, A.,& Martiawan, R. (2019). Pengembangan Destinasi Wisata Cianjur Selatan Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9 (1), 490-511.

Buku

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.

Gee, C. Y. (1997). *International Tourism: Global Perspektif*. Madrid: World Tourism Oerganizatin (WTO)

Hall, C.,M. (2000). *Tourism Planning: Polices, Processes, and Relationship*. England: Pearson Education.

Hall, C.,M., & Williams, A.,M. (2019). *Tourism planning: policies, processes and relationships*. England ; New York.

Heywood, A. (1997). *Politics*. Macmillan: Andalus University.

Parsons, W. (2001). *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi/PERDA/Nomor 04/2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2025.

Richardson, J. I., & Fluker, M. (2004). *Understanding And Managing Tourism*. Australia: Pearson Education Australia.

Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. CV. Sah Media.

Sukma, I. N., & Arismayanti, N. K. (2015). *Paradigma dan Kebijakan Pariwisata*. Denpasar: Cakra Press.

Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Teguh, F. (2015). *Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosisitem Pariwisata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.